

**ADANYA PERSENGKOKOLAN DALAM PELELANGAN
PEMBANGUNAN PASAR SEMI MODERN DI SUKABUMI JAWA
BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI SERTA
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.”
(Study Kasus : Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2012)**

Tamami

Abstrak

KPPU adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dan memikul amanah dari pelaksanaan UULPM. KPPU pada hakekatnya mengemban misi untuk memastikan berfungsinya motor penggerak ekonomi pasar, yaitu terciptanya persaingan usaha yang efektif yang sesuai dengan fungsi dibentuknya UULPM. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena sanksi pidana tetap merupakan kewenangan pengadilan. KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif saja, akan tetapi apabila sanksi administratif tersebut tidak bisa di eksekusi kepada pelaku usaha yang dijatuhkan putusan KPPU.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui terjadinya Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat dan mengetahui pelanggaran yang berkaitan dengan Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat yang tertera pada isi Putusan No. 07/KPPU-L/2012 yang dapat ditindak oleh KPPU dan bagaimana upaya hukum selanjutnya. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Hasil penelitian Putusan KPPU Nomor 19 / KPPU-L/ 2005 tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer-BOT) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 tidak termasuk dan tidak terbukti merupakan persekongkolan menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian dasar pertimbangan putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2005 mengenai persekongkolan tidak sesuai dengan maksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dasar pertimbangan KPPU dalam merumuskan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah ”jauh lebih luas” dari pada arti dan maksud Pasal 22 tersebut, karena dalam Pasal 22 dan Pasal 1 angka 8 ini tidak termuat atau tidak mengandung unsur-unsur kerjasama, maksud, dan menguasai pasar bersangkutan.

Kata Kunci: Persengkokolan dan Pelelangan

**CONSPIRACY EXISTENCE IN MODERN SEMI AUCTION MARKET
DEVELOPMENT IN WEST JAVA SUKABUMI VIEWED FROM LAW
NUMBER 5 YEAR 1999 ON THE PROHIBITION OF MONOPOLY
PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION. "**
(CASE STUDY: CASE VERDICT NO. 07 / KPPU-L / 2012)

Tamami

Abstract

KPPU is the most responsible institution and bear the mandate of UULPM implementation. KPPU is essentially on a mission to ensure the functioning of the market economy driving motor, namely the creation of effective business competition in accordance with the function of UULPM establishment. KPPU does not have the authority to impose criminal sanctions, because criminal sanctions remain the jurisdiction of the court. KPPU only has the authority to impose administrative sanction only, but if the administrative sanction can not be executed to the business actors who passed the decision of KPPU.

The purpose of this study was to determine the occurrence of conspiracy In Spring Modern Auction Market Development In Sukabumi, West Java and knowing violations related to conspiracy In Spring Modern Auction Market Development In Sukabumi, West Java listed on the contents of Decision No. 07 / KPPU-L / 2012 which can be dealt with by KPPU and how the next legal effort. This study will examine the subject through a juridical-normative approach. This normative legal research, which is studied is library material or secondary data covering primary law material, secondary law material, and tertiary legal material.

The results of the study the Commission's Decision No. 19 / KPPU-L / 2005 is not consistent with the intent of the provisions of Article 22 of Law No. 5 of 1999 for Public Auction Legal Partner Development Cooperation Traditional Market Semi Modern Pattern Build To Deliver (Build Operate Transfer-BOT) in Sukabumi in 2011 are not included and are not proven to be a conspiracy, according to Article 22 of Law No. 5 of 1999. Then, the basic consideration KPPU decision No. 19 / KPPU-L / 2005 concerning the conspiracy was not in accordance with the purpose of Article 22 of Law Number 5 Year 1999. The basic consideration of KPPU in formulating the provision of Article 22 of Law Number 5 Year 1999 is "much wider" than the meaning and intent of Article 22, because in Article 22 and Article 1 point 8 this does not contain or contains elements of cooperation , Intent, and dominate the relevant market.

Keywords: *Complaints and Auctions*